



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 9 September 2014 No. 72

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : R. RUDDY GANDAKUSUMAH, S.H., M.H. |
| 2. Jabatan | : KEPALA BIRO - HUBUNGAN MASYARAKAT,
PROTOKOL DAN UMUM - SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. DIPONEGORO NO. 22, BANDUNG |
| 4. Tanggal Pelaporan | : 12 Februari 2014 |

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. **0**
(TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah seluas 304 m² , di Kota BANDUNG, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun -- NJOP Rp.0
2. Tanah seluas 947 m² , di Kabupaten CIANJUR, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun -- NJOP Rp.0

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. **126.000.000**
DAN MESIN LAINNYA

1. Mobil, merk NISSAN X-TRAIL, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004 nilai jual Rp.120.000.000
2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 nilai jual Rp.6.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	0
C. SURAT BERTAGAH Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	346.850.878
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.346.850.878		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	472.850.878
III. HUTANG Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	472.850.878

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

TTD
CAHYA H. HAREFA

Jakarta, 18 Agustus 2014
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
Pemeriksaan LHKPN
DIREKTUR

TTD
CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.